

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Kabupaten**Bone****Desy Ekayanti¹⁾, Rosleny Babo²⁾, Suardi³⁾, Nurdevi Bte Abdul⁴⁾, Hasruddin Nur⁵⁾**¹⁾ *Program Pascasarjana Pendidikan Sosiologi* Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221²⁾ *Program Pascasarjana Pendidikan Dasar* Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221³⁾ *Program Studi Pendidikan Sosiologi* Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221⁴⁾ *Program pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221⁵⁾ *Program Studi Sosiologi* Universitas Sawerigading Makassar, IndonesiaCorresponding Author: Desy ekayanti, Email: desyekeyanti22@gmail.com**History:** Received 05/01/2023 | Revised 15/01/2023 | Accepted 26/01/2023 | Published 30/01/2023

Abstract. Permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa poleonro kecamatan ponre Tujuan Untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa poleonro Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan kurang baik ,karena dapat dilihat dalam bentuk kehadiran hanya aparat-aparat desa yang hadir dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun musyawarah yang dilaksanakan di tingkat. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga maupun alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat Desa poleonro yang masih kental. Sedangkan dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa poleonro sudah cukup baik, khususnya dalam tahap pelaksanaan, berbeda dengan tahap evaluasi dan perencanaan yang partisipasi masyarakatnya masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa poleonro meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor internal diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan komunikasi. Kesimpulan Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan.

Keywords: Partisipasi; Masyarakat; Pengelola; Dana Desa**INTRODUCTION**

Otonomi daerah secara intensif dilaksanakan pada era reformasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-hak

sebagai warga Negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Lahirnya era reformasi yang telah menghasilkan berbagai produk Undang-undang terutama yang mengatur masalah penyelenggaraan otonomi daerah.

Journal Socius Education (JSE)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten/ kota saja tetapi juga desa sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 24 Tahun 2014).

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada

pembangunan di pedesaan. Olehnya itu, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat diperlukan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah khususnya di pedesaan (Hermawan, 2019).

Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di atasnya, karena di desa konsep kehidupan bersama, gotong royong, dan kekeluargaan masih sangat kuat. Oleh karena itu, konsep partisipasi masyarakat mempunyai andil dan esensi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Mada et al., 2017).

Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek melainkan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, serta masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam suatu program (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al., 2019)

pembangunan khususnya dalam pengelolaan dana desa dianggap penting oleh

Journal Socius Education (JSE)

pemerintah, baik dalam proses penyusunan program maupun dalam pengelolaan atau pelaksanaan program itu sendiri. Yang bermuara, bukan hanya untuk kebaikan pemerintah tetapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa (Alqadri, 2014).

Melalui dana desa, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat partisipasi (Hulu et al., 2018). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014).

Dengan diterapkannya kebijakan dana desa ini masyarakat desa harus mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Jika belum memahami hak dan kewajibannya, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menaruh perhatian. Pengelolaan dana desa dimaksudkan untuk mengefektifkan program

yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dalam Peraturan Pemerintah merupakan bentuk konkrit upaya Negara dalam menciptakan ketertiban di bidang keuangan atau dana desa, terutama di Desa Poleonro

Kecamatan Poleonro Kabupaten Bone. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan ketersediaan keuangan desa semakin tinggi pula. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa terkait, terkadang masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir.

Perlu disadari bersama bahwa dalam usaha untuk menentukan arah dan tujuan pengelolaan pembangunan pemerintah desa juga mengalami keterbatasan, salah satunya keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga dibutuhkan upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, baik dalam perencanaan,

Journal Socius Education (JSE)

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran(Isbandi, 2007).

Ada beberapa desa yang belum siap menerima dana desa di tahun 2015. Ketidaksiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan program. Akibatnya, penggunaan dana desa baik dari segi kelembagaan maupun pelaksanaan bukan hanya tidak partisipatif, justru melibatkan lebih banyak aparat birokrasi di tingkat desa maupun kabupaten. Selain itu, munculnya program yang tidak tepat sasaran Muhiddin (Ekayanti D 2022).

Program dana desa yang tengah digiatkan oleh pemerintah pusat, idealnya program ini didasarkan pada pola *bottom up* yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan serta memberikan kewenangan desa untuk menentukan sendiri sasaran pembangunan yang mereka inginkan.(Hardianti, 2017) Hanya saja dalam pelaksanaannya, penulis menemukan masih ada beberapa hambatan yang menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap beberapa masyarakat termasuk kepala urusan keuangan desa Poleonro menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat(Laily, 2015) merupakan kendala utama dalam pelaksanaannya. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat(Arifin & Fitri, 2023)

dalam pengelolaan dana desa di Desa Poleonro Kecamatan ponre Kabupaten Bone.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu

Untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa poleonro Kecamatan Poleonro Kabupaten Bone. dan Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Poleonro Kecamatan Poleonro kabupaten Bone.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif.(C. K. Putra et al., 2012) Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan Studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di desa Poleonro kec.ponre kab. Bone dengan sampel masyarakat desa Poleonro waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan

Fokus Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan Moleong, (Ekayanti D 2022) . Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di

Journal Socius Education (JSE)

Desa Poleonro Kecamatan Poleonro
Kabupaten Bone

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan lembar observasi atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data yang menjadi bahan baku penelitian, untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, sintesa, menyusun kedalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

DISCUSSION

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program dana desa di Desa Poleonro, dimulai dari desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan

untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.(I. M. Y. D. Putra et al., 2021) Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak, adalah :

Pertama, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program tersebut. partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dana desa di Desa Poleonro Satu, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala jaga, supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Tujuan dari kepala jaga untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan di lingkungan itu.(Lubis, 2009)

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat. Ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,

Journal Socius Education (JSE)

agar pembangunan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Maka proses musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat Desa Poleonro dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan kontrol dalam pengambilan keputusan tersebut (Aziz & Irmawati, 2021).

Seharusnya tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui penggunaan dana desa diawali dari sosialisasi pembangunan desa, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa. (C. K. Putra et al., 2012) Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak serta-merta berasal dari para usulan dari para *stakeholder*, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang

menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan. (Hermawan, 2019)

Dari data yang diperoleh dilapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dilibatkan semuanya dalam tahapan pengambilan keputusan terkait rencana program pembangunan dana desa. Kinerja pemerintah desa Poleonro Satu belum bisa dibilang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat. hal ini sama dengan penelitian yang pernah dilakukan Oleh Satria M, Tumbel (2017) dengan Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” dengan hasil penelitian yaitu masyarakat jaga tidak di ikut sertakan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa

Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar

Journal Socius Education (JSE)

masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani.

Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa (Masa et al., 2023).

Pertama, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan kemajuan bersama.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil perbaikan jalan,

penggalan parit, pembangunan rabat beton dan lain-lain.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur maupun yang mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur setiap program yang sudah dijalankan, diantaranya memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin dalam hal ini memang sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan sebaik mungkin agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan.

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan desa. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna.

Masyarakat desa Poleonro satu pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih

Journal Socius Education (JSE)

aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan. Masyarakat desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil kerja serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan.(Widagdo et al., 2016)

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa poleonro Kecamatan Ponre Kabupaten Bone , yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di Desa Poleonro juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

Melihat dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan program dana desa. Seperti yang diungkapkan oleh Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: Faktor internal DAN Faktor eksternal

Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan di dengarnya, semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan tergantung minat serta keinginannya untuk mengetahuinya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar Chaniago. (2002:427-428). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman tersebut yaitu:

Berdasarkan mata pencaharian masyarakat di Desa Poleonro Satu yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan juga partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Di samping penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama, tingkat kesibukannya yang berbeda-beda, semua itu dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mengingat masyarakat di Desa Poleonro Satu mayoritas merupakan petani, hal itu sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena mereka banyak waktu untuk bekerja di ladang, selain itu juga masyarakat sibuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga dengan menghabiskan banyak waktu sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan pembangunan di

Journal Socius Education (JSE)

Desa. Hal tersebut adalah merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian.

Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan masyarakat semakin baik juga pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang merupakan penduduk baru dalam suatu masyarakat, maka sulit juga untuknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Poleonro Satu hanya beberapa orang penduduk pendatang yang menetap di desa, karena istri atau suaminya yang berasal dari desa dan suaminya dari luar dan sebaliknya Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Poleonro Satu adalah petani (ladang). Pekerjaan ini sangat menyita waktu masyarakat karena bila musim ladang pada pagi hari sudah beraktifitas dengan benar pulang pada siang atau sore hari, sehingga bilamana diundang waktu rapat mereka tidak datang itu karena masih merasa letih.

Humam (Ekayanti D, 2022) mengatakan bahwa pekerjaan memang secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan

proses pertukaran informasi, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. Selain itu Ahmadi (Ekayanti D, 2022) juga mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Pemahaman masyarakat mengenai Program Dana Desa di Desa Poleonro Satu tidak berpengaruh pada usia seseorang atau masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, bahwa masyarakat yang berusia 18-69 tahun berjumlah atau 75% penduduk yang tidak memahami Program Dana Desa. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemerintah Desa mensosialisasikan Program tersebut kepada masyarakat. Adapun rapat yang sifatnya sosialisasi Program Dana Desa tersebut namun selalu dilaksanakan di kantor Desa dan belum pernah disosialisasikan di setiap jaga yang ada di Desa Poleonro Satu.

Selain itu faktor kurangnya pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan Program tersebut. Adapun beberapa masyarakat yang memahami program tersebut itu mendapat informasi dari kawannya yang mengerti namun tidak memahami sepenuhnya program Dana Desa.

Journal Socius Education (JSE)

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi stakeholder dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder, jika sambutan dari pihak stakeholder positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan stakeholder yang positif dan tepat dibutuhkan oleh partisipan, maka partisipan tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah masyarakat yang ada di Desa Poleonro Satu dan yang menjadi stakeholder adalah orang-orang yang berada pada pemerintahan Desa Poleonro Satu yang berpengaruh besar dalam pembangunan desa.

Dibawah ini akan dibahas mengenai faktor eksternal dari Informan penelitian yaitu mengenai tingkat intensitas interaksi antara pemerintah dengan Informan dan mengenai bagaimana tingkat transparansi pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan kepada Informan yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Poleonro.

Tingkat intensitas interaksi ahmadi disini diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada masyarakat di Desa Poleonro Satu dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui, berinteraksi,

bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat. Mayoritas Informan merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang jarang sekali.

Tingkat transparansi dalam penelitian ini diartikan seberapa transparannya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan penganggarannya.

Partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Poleonro Satu pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat merupakan panduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan di Desa Poleonro Satu dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan sudah cukup baik dalam pemimpin desa poleonro.

Journal Socius Education (JSE)

CONCLUSION

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa poleonro Kecamatan Poleonro Kabupaten Bonemaka dapat disimpulkan bahwa: Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan, baik musyawarah di tingkat dusun maupun di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, alat, makanan dan minuman. Hal ini dipengaruhi oleh karena gotong royong masyarakat Desa poleonro yang masih kental. Dalam tahap evaluasi, masyarakat yang berpartisipasi dalam tahap ini, memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pengelola anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama. Pada tahap evaluasi masih tergolong rendah disebabkan ketidakpahaman masyarakat serta pemerintah Desa juga belum maksimal memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tahap evaluasi. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa poleonro Kecamatan Poleonro Kabupaten Bone Adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah faktor usia, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dalam faktor

internal diantaranya adalah faktor kepemimpinan dan komunikasi.

REFERENCES

- [1] Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. FISIP UI Press. Depok
- [2] Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pemangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- [3] Alqadri, Rahmat. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*.
- [4] Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i2.4003>
- [5] Arifin, J., & Fitri, A. A. (2023). *Partisipasi Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai Corresponding Author: 05(1)*, 28–37.
- [6] Astuti, S. I. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*.
- [7] Desy Ekayanti, (2022) *Partisipasi masyarakat dalam pengolaan dana desa skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar*
- [8] Hardianti, S., & Muhammad, H. (2002). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)*. 1993, 120–126.
- [9] Hermawan, E. (2019). *Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia*. *International Journal of Science and Society*,

Journal Socius Education (JSE)

- 1(3), 67–79.
<https://doi.org/10.54783/ijsec.v1i3.30>
- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*.
- [11] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- [12] Luthfi, dkk. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang*. Jurnal Inovasi Kebijakan. Matra Pembaruan Vol. 1 No. 2
- [13] Laily, E. I. N. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif, kebijakan dan manajemen publik*. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(3), 186–190.
- [14] Lubis, A. (2009). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, 6(2), 181–190.p
- [15] Manggala, Yusuf. (2017). *Analisis Faktor-faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang*
- [16] Mardikanto, Totok. (2014). *Coorporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Koorporasi)*. Alfabeth. Bandung
- [17] Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 106–115.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- [18] Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 106–115.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- [19] Muhiddin, Amir. (2017). *Penduduk dan Kualitas Demokrasi: Kumpulan Artikel Kependudukan, Politik dan Pembangunan Demokrasi*. Deepublish. Yogyakarta
- [20] Muhiddin, Amir. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
- [21] Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1203–1212.
- [22] Siregar, I. (2001). *Tesis Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan*. Universitas Indonesia. Depok (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung
- [23] Putra, I. M. Y. D., Rasmini, N. K., Gayatri, G., & Ratnadi, N. M. D. (2021). *Organizational culture as moderating the influence of internal control and community participation on fraud prevention in village fund management during the COVID-19 pandemic*. Linguistics and Culture Review, 6(August 2021), 351–362.
<https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2050>
- [24] Masa, P., Covid-, P., & Iloheluma, D. (2023). *Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma*. XI(April), 100–112.
- [25] V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker, W. P. and K. M. B., Burkhardt, H., Ph, R. O., Vogiatzis, G., Hernández, C., Priese, L., Harker, M., O’Leary, P., Geometry, R., Analysis, G., Amato, G., Ciampi, L., Falchi, F., Gennaro, C., Ricci, E., Rota, S., Snoek, C., Lanz, O., Goos, G., ... Einschub, M. (2019). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALAHUNDE KECAMATAN PAKUE*

Journal Socius Education (JSE)

TENGAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.
Society, 2(1), 1–19.
[http://www.scopus.com/inward/record.u?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%](http://www.scopus.com/inward/record.u?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%3A)

- [26] Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154.
<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ju pii>
- [27] Isbandi. (2007). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_\(05-24-13-09-02-30\).pdfpems](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-09-02-30).pdfpems)
- [28] Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>